



**LAPORAN KEPUASAAN DAN KEPATUHAN
PADA STANDAR PELAYANAN**



TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Kepuasan dan Kepatuhan atas Standar Pelayanan Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengukur kinerja secara terstandar dan akuntabel.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga pelayanan pelayanan dasar sub urusan bencana dapat diselesaikan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan dasar untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah.

Tabanan, 31 Desember 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



[Signature]
I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 2

BAB II STANDAR PELAYANAN KEBENCANAAN..... 3

 2.1 Sumber Daya Manusia..... 3

 2.2 Standar Operasional Prosedur..... 3

 2.3 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana 4

 2.4 Sarana dan Prasarana Pelayanan..... 4

BAB III EVALUASI KEPATUHAN PELAYANAN KEBENCANAAN..... 5

 3.1 Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan..... 5

 3.2 Evaluasi Indikator Penanggulangan Bencana..... 6

 3.3 Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan..... 7

 3.4 Evaluasi Layanan Kebencanaan 8

BAB IV PENUTUP 9

 4.1 Kesimpulan 9

 4.2 Saran 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelayanan wajib dasar sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pasal 1 yang menyatakan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya melaksanakan pelayanan publik agar semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadikan masyarakat tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik kebencanaan maka dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah secara berkala.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/947/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan informasi SOP pelayanan yang dilaksanakan di BPBD
2. Memberikan informasi kinerja pelayanan publik terkait kebencanaan dalam upaya mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

II. STANDAR PELAYANAN KEBENCANAAN

2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 15 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Reaksi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 6 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat perencanaan penanggulangan bencana sebanyak 2 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang

2.2 Stándar Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 tahun 2019 telah melaksanakan 3 jenis stándar pelayanan urusan wajib dasar sub urusan bencana yang tidak dipungut biaya dan 1 standar pelayanan yang diusulkan di tahun 2024 seperti berikut ini.

No	Stándar Pelayanan	Tahun disahkan	Pelaksana Teknis
1	Pelayanan Sosialisasi Mitigasi Bencana	2024	Bidang PK
2	Pelayanan Jasa Pemberian Logistik Berencana	2019	Bidang KL
3	Pelayanan Penanganan Bencana	2019	Bidang KL
4	Pelayanan Bantuan Sosial yang tidak Dapat Direncanakan	2019	Bidang RR

Terlampir hasil peninjauan stándar pelayanan.

2.3 Stándar Operasional Prosedur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan SOP sebagai panduan apartur dalam memberikan pelayanan, yaitu :

- 1. SOP Pemantauan pengelolaan risiko perangkat daerah nomor : 065/0391/Org tanggal penerbitan 3 Juli 2023
- 2. SOP Penilaian kerusakan / kerugian atas verifikasi bantuan pasca bencana tanggal terbit 30 Januari 2023
- 3. 3.SOP Pengaduan nomor : 065/0014/Org tanggal terbit 30 Januari 2023
- 4. SOP Pendistribusian logistik nomor : 065/0012/Org tanggal terbit 30 Januari 2023

2.4 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator penanggulangan bencana. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, Relawan, Forum PRB, dan Satgas. Adapun target kinerjanya tertuang dalam :

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

2.5 Sarana dan Prasarana Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan layanan publik kebencanaan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pokok sebagai berikut :

- a. Sarana layanan pengaduan
 - Call centre tanggap bencana dengan nomor 0361-811171
 - internet / telomsel dan wifi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - meja dan kursi tamu
 - kursi tunggu di depan kantor dilegkapi 2 kursi kayu
 - meja penerimaan layanan dan pengaduan yang diterima oleh 2 (dua) orang pegawai
 - komputer dan printer
 - kotak pegaduan
 - kotak kepuasan
 - peralatan tanggap bencana
- b. Prasarana layanan pengaduan
 - Ruang tamu dan ruang tunggu (belum ada pendingin / AC)
 - Ruang pengolahan data dan informasi
 - Ruang menyusui

III. EVALUASI KEPATUHAN PELAYANAN KEBENCANAAN

3.1 Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

a. SP Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana

Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan jumlah personil 4 orang. Periode Januari sd Desember sudah dilakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada aparatur, siswa, swasta, dan masyarakat di daerah rawan bencana sebanyak orang dengan sebaran :

- 60 orang aparatur
- 2.281 orang siswa SD, SMP, SMK
- 547 orang masyarakat umum
- Masyarakat yang menerima sosialisasi dalam wawancara langsung semuanya merasakan puas menerima layanan mitigasi bencana.

b. SP Pelayanan Jasa Pemberian Logistik Berencana

Pelayanan jasa pemberian logistik berencana dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan jumlah personil 39 orang. Periode Januari sd Desember sudah pemberian logistik berencana di daerah terdampak bencana sebanyak 19 titik kejadian bencana dan setelah dilakukan penanganan dan identifikasi kebutuhan logistik maka telah disebar 19 paket logistik :

- logistik kepada masyarakat terampak kebakaran : 14 paket logistik
- logistik kepada masyarakat terampak bencana alam lainnya : 5 paket logistik
- Masyarakat yang terdampak bencana menyatakan puas atas pelayanan dan bantuan Tim.

c. SP Pelayanan Penanganan Bencana

Pelayanan penanganan bencana dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan jumlah personil 39 orang. Periode Januari sd Desember terjadi 330 titik kejadian bencana yang ditangani melalui kolaborasi Tim BPBD dengan instansi terkait dengan sebaran data :

- 163 titik penanganan bencana cuaca ekstrim pohon tumbang
- 34 titik penanganan bencana longsor
- 10 titik penanganan bencana banjir
- 12 titik penanganan bencana kebakaran
- 71 titik penanganan bencana lainnya (orang hilang, orang hanyut, lainnya)

Masyarakat yang terdampak bencana dari hasil wawancara menyatakan puas atas pelayanan Tim BPBD

d. SP Pelayanan Bantuan Sosial yang tidak dapat Direncanakan

Pelayanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dengan jumlah personil 4 orang. Periode Januari sd Desember terjadi 172 titik kejadian bencana yang ditangani TRC maupun ditangani swadaya masyarakat dan dilaporkan ke BPBD. Adapun kegiatan jitupasna telah melakukan survey dan kaji cepat :

- sudah disurvey 172 titik lokasi
- sudah dibuatkan hasil kaji cepat dan 172 titik lokasi
- sudah direkomendasikan untuk dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari bansos tidak dapat direncanakan.
- masyarakat yang terdampak bencana dari hasil wawancara menyatakan puas atas pelayanan Tim Jitupasna

e. SOP Pemantauan pengelolaan risiko perangkat daerah nomor : 065/0391/Org tanggal penerbitan 3 Juli 2023

Aparatur BPBD dalam pengelolaan risiko dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang secara teknis operasional dikendalikan oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi. Periode Januari sd Desember untuk risiko kebencanaan sudah dievaluasi :

- Perencanaan sudah mengikuti dokumen Kajian Risiko Bencana dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
- Risk Register sudah disusun dan dievaluasi secara berkala (triwulanan)
- Manutitas Risiko sudah disusun dan dievaluasi secara berkala (triwulanan)
- Reviu dari Inspektorat telah dijadikan bahan rencana tindak lanjut.

f. SOP Penilaian kerusakan / kerugian atas verifikasi bantuan pasca bencana tanggal terbit 30 Januari 2023

Aparatur BPBD dalam penilaian kerusakan / kerugian atas verifikasi bantuan pasca bencana dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang secara teknis operasional dikendalikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi. Periode Januari sd Desember untuk penilaian kerusakan / kerugian atas verifikasi bantuan pasca bencana sudah terverifikasi 172 titik kejadian.

g. SOP Pengaduan nomor : 065/0014/Org tanggal terbit 30 Januari 2023

Aparatur BPBD dalam menangani pengaduan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang secara teknis operasional dikendalikan oleh Sekretaris selaku Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi. Periode Januari sd Desember dari 330 call centre masyarakat yang terdampak bencana tidak ada mengajukan keluhan atau pengaduan langsung karena masyarakat lebih yakin

dengan call centre atau langsung datang ke kantor BPBD untuk memohon penanganan tanggap / darurat bencana. Untuk 1 pengaduan di SP4N LAPOR dari Desa Wanasari sudah ditangani dan dikoordinasikan sehingga sudah diambil tindak lanjutnya.

- h. SOP Pendistribusian logistik nomor : 065/0012/Org terbit 30 Januari 2023
- Aparatur BPBD pendistribusian logistik bencana dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang secara teknis operasional dikendalikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik. Periode Januari sd Desember sudah disalurkan logistik 19 titik bantuan berupa kasur, bantal, kompor, dan paket sembako. Bagi masyarakat yang melaksanakan PHBS disalurkan bantuan sabun batangan dan sabun cuci tangan.

3.2 Evaluasi Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian indikator penanggulangan bencana. Adapun kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat dan upaya penanganannya sangat tergantung pada tingkat bahaya yang terjadi, peralatan yang dipergunakan, koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana disajikan seperti berikut ini.

Progam	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	Kegiatan mitigasi bencana, tanggap bencana, dan rehabilitasi pasca bencana sudah semua terlaksana sesuai skala prioritas

Sumber : Data diolah, 2024

Adapun pelayanan masyarakat yang rawan bencana, terdampak bencana, dan pemulihan dampak bencana disajikan seperti berikut ini.

No	Bencana	Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	Rawan bencana	Sosialisasi KIE	60 desa	Sosialisasi KIE dilakukan kepada aparatur pemerintah kabupaten, desa, anak sekolah, dan masyarakat
2	Tanggap bencana	Penanganan cepat	330 titik kejadian	Penanganan cepat melibatkan pentahelik secara gotong royong
3	Rehabilitasi pasca bencana	Survey, verifikasi, dan usulan bansos	172 lokasi	Rekomendasi bencana berdasarkan hasil survey dan verifikasi yang melibatkan tim

Sumber : Data diolah, 2024

3.3 Evaluasi Kondisi Sarana dan Prasarana Layanan

a. Evaluasi kondisi sarana kerja layanan

- Sarana pengaduan yang sering bermasalah adalah jaringan internet yang sering mati dan lambat.
- Kursi dan meja tamu yang sudah rusak ringan
- Kursi tunggu layanan masih sederhana dan dasarnya masih tanah.
- Peralatan layanan kebencanaan yang sering mengalami kerusakan.

b. Evaluasi prasarana kerja layanan

- Ruang tunggu yang sempit dan belum ada pendingin atau beluma da AC
- Ruang pengolahan data dan informasi belum tersendiri atau masih di Sekretariat
- Kamar mandi masih dirancang tambahan pegangan tangan bagi disabilitas

3.4 Evaluasi Layanan Kebencanaan

Dari hasil pengukuran pelayanan publik diatas, maka dapat dianalisis bahwa Tim BPBD sudah mampu membrikan pelayanan sesuai aturan yang diamanahkan .

a. Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaanya sudah mampu diupayakan melalui kegiatan:

- Sosialisasi KIE tatap muka kepada 60 orang aparatur desa
- Sosialisasi mitigasi bencana kepada 2.818 orang yang terdiri dari 2.281 orang siswa dan 547 orang karyawan dan masyarakat umum

b. Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana

- Pembentukan desa tangguh bencana di Desa Antap Kec. Selemadeg dan Desa Lalaglinggah Kec Selemadeg Barat masih tahap koordinasi dengan aparat desa
- Pembentukan dan pengukuhan fórum pengurangan risiko bencana desa Antap Nomor 31 Tahun 2024 dan fórum pengurangan risiko bencana desa Lalanglinggah Nomor 17 Tahun 2024
- Pembentukan dan pengukuhan relawan Desa Antap Nomor 32 Tahun 2024 dan relawan Desa Lalaglinggah Nomor 18 Tahun 2024.

c. Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana

- Tim BPBD (TRC dan Staf Teknis) telah menerima informasi / permohonan penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam. Adapun hasil penanganan dan kepuasan layanan penerima layanan sudah semuanya berterima kasih dan merasa puas dengan layanan tanggap bencana dari BPBD.
- Masyarakat yang terdampak bencana ditindaklanjuti dengan survey jitupasna untuk menentukan prediksi tingkat kerugian dan menajdi dasar kajian teknis bansos.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

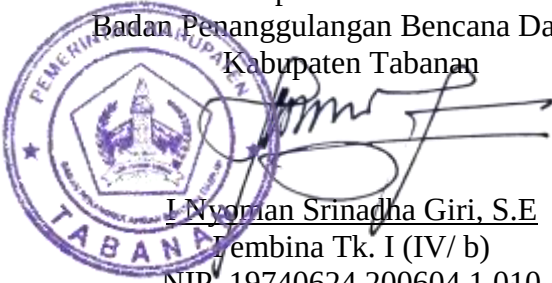
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar pelayanan kebencanaan secara berkala.
- b. Capaian kinerja pelayanan telah diukur untuk telah dievaluasi secara berkala, baik di pelayanan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan 4 (empat) SOP telah dapat dilaksanakan dengan baik dan masyarakat yang terdampak bencana tidak ada keluhan atau pegaduan lanjutan atas pelayanan kebencanaan dengan moto : tanggap, tangkas, pantang pulang sebelum tuntas.
- c. Capain kinerja kepuasan pelayanan masyarakat yang terdampak bencana periode Janauri sd Desember 2024 hasil análisís menunjukkan semua masyarakat yang memohon layanan kebencanaan sudah langsung menyatakan puas atas layanan yang diberikan Tim BPBD.

4.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai standar pelayanan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penguatan SDM aparatur dalam memberikan layanan melalui bimtek/pelatihan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *pentahelik* sehingga pelayanan publik dapat terintegrasi.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

a. Kepatuhan terhadap SOP

No	Nama SOP	Ko Pelaksanaan Teknis	Evaluasi
1	Pemantauan pengelolaan risiko perangkat daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sudah sesuai Perbup 93 tahun 2022
2	Penilaian kerusakan / kerugian atas verifikasi bantuan pasca bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Sudah sesuai JITUPASNA
3	Pengaduan	Sekretariat	Sudah sesuai prosedur Call Centre dan SP4N LAPOR
4	Pendistribusian logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sudah Sesuai Juknis

b. Kepatuhan terhadap Stándar Pelayanan

No	Nama Stándar Pelayanan	Ko Pelaksanaan Teknis	Evaluasi
1	Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sudah menysar 2.818 aparat, siswa SMP, dan masyarakat umum
2	Pelayanan Pemberian Logistik Berencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sudah disalurkan ke 19 masyarakat terdampak bencana
3	Pelayanan Penanganan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sudah tertangani 330 titik bencana
4	Pelayanan Bantuan Sosial yang tidak Dapat Direncanakan	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	Sudah difasilitasi 172 verifikasi lapang dan direkomendasikan

Penjabaran data :

b.1 Pelayanan sosialisasi mitigasi bencana

Triwulan	Nama Sekolah	Peserta/ orang	Keterangan	Kepuasan
I	SMP Primary	23	Guru dan Siswa	Puas
II	SMP 2 Kediri	200	Guru dan Siswa	Puas
II	SMP 2 Seltim	150	Guru dan Siswa	Puas
II	SMP 1 Selemadeg	100	Siswa	Puas
II	SMP Bali Primary	23	Siswa	Puas
III	SMP/MI Al Amin	200	Siswa	Puas
III	SMP Bintang Persada	200	Siswa	Puas
III	SDN 2 Dauh Peken	155	Siswa	Puas
III	SDN 2 Sudimara	118	Siswa	Puas
III	SD Bintang Persada	516	Siswa	Puas
III	SDN 2 Antap	100	Siswa	Puas
III	SDN 1 Lalainggah	42	Siswa	Puas
IV	SMK Bintang Persada	263	Siswa	Puas

b.3 Uraian 2 Pelayanan Pemberian Logistik Berencana

No	Kecamatan	Penyerahan paket logistik	Bencana yang dialami masyarakat
1	Kediri	1 paket di Ds Pejaten	Rumah kebakaran
2	Tabanan	3 paket di Ds Delod Peken, Sudimara, Dauh Peken	Kebakaran rumah/dapur
3	Kerambitan	1 paket di Ds Baturiti	Kebakaran rumah
4	Selemadeg Timur	5 paket di Ds Tegal Mengkeb, Gadungan, Mambang, Megati	Kebakaran, kerusakan dapur, rumah longsor
5	Selemadeg	1 paket di Ds Berembeng	Kebakaran
6	Selemadeg Barat	-	-
7	Marga	-	-
8	Baturiti	1 paket di Desa Antapan	Rumah longsor
9	Penebel	5 paket di Ds Penatahan, Tengkidak, Riang Gede	Kebakaran rumah/dapur
10	Pupuan	1 Paket di Ds Punggang	Kebakaran dapur
	Jumlah	19 paket	

b.3 Uraian 3 Pelayanan Penanganan Bencana

Bulan	Jumlah call centre masuk	Jumlah pelayanan tanggap bencana	Hasil wawancara lisan penerima layanan
I	19	19	Semua menyatakan puas
II	8	8	Semua menyatakan puas
III	71	71	Semua menyatakan puas
IV	17	17	Semua menyatakan puas
V	13	13	Semua menyatakan puas
VI	5	5	Semua menyatakan puas
VII	11	11	Semua menyatakan puas
VIII	17	17	Semua menyatakan puas
IX	13	13	Semua menyatakan puas
X	21	21	Semua menyatakan puas
XI	62	62	Semua menyatakan puas
XII	73	73	Semua menyatakan puas
Jumlah	330	330	

b.4 Pelayanan Bantuan Sosial yang tidak Dapat Direncanakan

No	Kecamatan	Realisasi Jitupasna / titik penanganan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Kediri	7	3	0	2
2	Tabanan	15	5	0	8
3	Kerambitan	6	2	0	4
4	Selemadeg Timur	10	6	0	2
5	Selemadeg	2	1	0	2

6	Selemadeg Barat	6	1	0	1
7	Marga	12	4	0	1
8	Baturiti	2	2	0	3
9	Penebel	20	19	0	3
10	Pupuan	12	5	0	5
	Jumlah	92	49	0	31

Sekretaris BPBD,
Selaku PPIP Pembantu,



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009



BERITA ACARA PENINJANUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TABANAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

No	Nama Komponen	Identifikasi	Ket
A			
1	Persyaratan	Masih relavan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
3	Jangka waktu pelayanan	Masih relevan	
4	Biaya / tarif	Masih relevan	
5	Produk Pelayanan	Disesuaikan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masih relevan	
B			
1	Dasar Hukum	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki	
3	Kompetensi pelaksana	Masih relevan	
4	Pengawasan internal	Masih relevan	
5	Jumlah pelaksana	Masih relevan	
6	Jaminan pelayanan	Masih relevan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Masih relevan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan publikasi	

2. Standar Pelayanan Penanganan Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Ket
A			
1	Persyaratan	Masih relavan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
3	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan KRB	
4	Biaya / tarif	Masih relevan	

5	Produk Pelayanan	Masih relevan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disesuaikan dengan penanggungjawab	
B			
1	Dasar Hukum	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki	
3	Kompetensi pelaksana	Masih relevan	
4	Pengawasan internal	Masih relevan	
5	Jumlah pelaksana	Masih relevan	
6	Jaminan pelayanan	Masih relevan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Masih relevan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan publikasi	

3. Standar Pelayanan Jasa Pemberian Logistik Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Ket
A			
1	Persyaratan	Masih relevan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
3	Jangka waktu pelayanan	Masih relevan	
4	Biaya / tarif	Masih relevan	
5	Produk Pelayanan	Masih relevan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disesuaikan dengan penanggungjawab	
B			
1	Dasar Hukum	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki	
3	Kompetensi pelaksana	Masih relevan	
4	Pengawasan internal	Masih relevan	
5	Jumlah pelaksana	Masih relevan	
6	Jaminan pelayanan	Masih relevan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Masih relevan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan publikasi	

4. Standar Pelayanan Sosialisasi Mitigasi Bencana

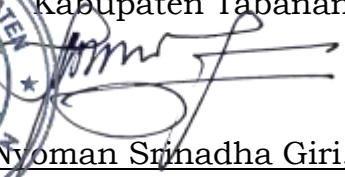
No	Nama Komponen	Identifikasi	Ket
A			
1	Persyaratan	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
3	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kondisi lapangan	
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya	
5	Produk Pelayanan	Sosialisasi mitigasi bencana	

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
B			
1	Dasar Hukum	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki	
3	Kompetensi pelaksana	Disesuaikan dengan aturan terbaru	
4	Pengawasan internal	Disesuaikan dengan aturan berjenjang	
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan SDM BPBD	
6	Jaminan pelayanan	Disesuaikan dengan moto	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Disesuaikan dengan moto	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan publikasi	

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

